Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

EFEKTIVITAS PERAN BP4 DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DAN MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN SINGOSARI

Salsabila Anjali Hermawan[1], Dwi Ari Kurniawati[2], Syamsu Madyan[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: 22101012017@unisma.ac.id, dwi.ari@unisma.ac.id[2], syamsumadyan@unisma.ac.id

Abstract

Early marriage remains a critical social issue in various regions of Indonesia, including the Singosari District, Malang Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the BP4 (Advisory, Guidance, and Preservation of Marriage Board) at the Singosari Office of Religious Affairs (KUA) in building family resilience and preventing early marriage. Using a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving BP4 staff, prospective brides and grooms, and community figures. The results show that BP4 has implemented several strategic programs, including Premarital Counseling (Bimwin), the Pusaka Sakinah Program, and the School-Age Youth Guidance (BRUS). These programs focus on educating prospective couples, strengthening existing marriages, and raising awareness among adolescents regarding reproductive health and the risks of early marriage. The effectiveness of these programs is reflected in the decline of early marriage cases—from 47 cases in 2023 to 38 in 2024, and further down to 17 by mid-2025. This indicates that BP4 plays a significant and practical role in shaping a more conscious, prepared, and resilient family structure. The study concludes that BP4's efforts can serve as a community-based intervention model for addressing early marriage in culturally embedded societies.

Keywords: *Early marriage, BP4, family resilience*

A. Pendahuluan

Pernikahan dini tetap menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan, kurangnya kontrol dari keluarga, serta kuatnya pengaruh budaya setempat yang memandang pernikahan di usia muda sebagai hal yang lumrah, bahkan kerap dijadikan jalan keluar atas masalah ekonomi dan sosial. Padahal, menikah sebelum mencapai usia yang matang berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya kelangsungan kehidupan rumah tangga, rendahnya pencapaian pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, hingga meningkatnya potensi perceraian.

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemerintah telah menetapkan kenaikan batas usia minimum menikah bagi perempuan dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, menyetarakan dengan batas usia bagi laki-laki. Kebijakan ini menjadi langkah nyata dalam upaya menekan angka pernikahan anak. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah yang memiliki budaya lokal yang kuat dan terbatasnya akses terhadap informasi. Tidak sedikit keluarga yang masih meyakini bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda merupakan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi atau menjaga martabat keluarga.

Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki peran yang sangat krusial dalam pembinaan kehidupan keluarga di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran substantif dalam memberikan arahan, nasihat, dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya pasangan yang akan dan telah menikah. BP4 hadir sebagai mitra yang strategis dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang mendalam. Peran utama BP4 terlihat dalam program-program bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin. Melalui kegiatan ini, calon suami dan istri dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kehidupan berumah tangga, termasuk komunikasi dalam pernikahan, manajemen konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antar pasangan. Bimbingan pranikah bertujuan untuk mempersiapkan pasangan secara mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Selain memberikan bimbingan pranikah, BP4 juga menyediakan layanan konseling bagi pasangan suami istri yang menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka. Layanan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan ruang dialog yang sehat antara kedua belah pihak. Melalui proses konseling, BP4 membantu pasangan untuk menemukan akar permasalahan dalam hubungan mereka, dan memberikan solusi yang bijak agar konflik tidak berlarut-larut. Fungsi ini sangat penting mengingat tingginya angka perceraian di berbagai daerah yang seringkali disebabkan oleh masalah yang

sebenarnya dapat diselesaikan jika ada pihak ketiga yang memberikan panduan secara netral dan profesional (Imran & Salim, 2022).

Di wilayah Kecamatan Singosari, perhatian terhadap peran Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memperkuat ketahanan keluarga serta mencegah terjadinya pernikahan dini masih tergolong minim dan jarang menjadi fokus kajian secara spesifik. Padahal, BP4 memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam mendampingi masyarakat menuju kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Selama ini, kajian-kajian yang ada cenderung lebih menyoroti kebijakan nasional atau isu pernikahan dini secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana peran aktif BP4 sebagai bagian dari struktur Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan khususnya di Singosari. Ketahanan keluarga merupakan kondisi ideal yang memungkinkan keluarga mampu bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Ketahanan ini dapat dicapai apabila keluarga memiliki tiga komponen penting, yaitu kemampuan beradaptasi, komunikasi yang efektif, serta fondasi spiritual yang kuat. Kemampuan adaptasi dibutuhkan agar keluarga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, seperti tekanan ekonomi, perbedaan pendapat antar anggota keluarga, atau peristiwa-peristiwa tak terduga lainnya. Sementara itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan relasi antarpersonal di dalam keluarga, menyelesaikan konflik secara sehat, serta membangun saling pengertian. Di sisi lain, nilai spiritual memberikan pedoman hidup yang kokoh, menjadi sumber ketenangan batin, dan menjadi pengarah dalam pengambilan keputusan keluarga yang bijak dan beretika.(Prayitno et al., 2021).

Meskipun BP4 telah memiliki program yang dirancang dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang ditawarkan. Banyak pasangan muda maupun remaja cenderung mengabaikan pentingnya bimbingan pranikah dan lebih memilih mengandalkan izin formal dari orang tua sebagai syarat cukup untuk menikah. Bahkan, terdapat kasus-kasus di mana pernikahan dilangsungkan melalui jalur dispensasi tanpa melibatkan BP4 sebagai pihak pemberi rekomendasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran vital BP4 dalam mempersiapkan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan masih terbatas.

Keberhasilan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini sangat bergantung pada adanya kolaborasi antara edukasi, pendekatan budaya, serta

dukungan dari kebijakan lokal. Di daerah pedesaan seperti Kecamatan Singosari, pendekatan berbasis komunitas menjadi sangat relevan. Pendekatan ini melibatkan peran aktif tokoh adat, pemuka agama, dan keluarga dalam mengawasi serta mendidik anak-anak mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Keterlibatan para pemangku kepentingan lokal ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan karena mereka memiliki kedekatan emosional dan otoritas moral di mata masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas sektor dan pelibatan komunitas lokal menjadi kunci penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif serta menciptakan lingkungan yang mendukung penundaan usia pernikahan demi mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas (Fitria et al., 2024).

Selain itu, minimnya peran ayah atau fenomena fatherless, perceraian orang tua, serta pola asuh oleh kakek-nenek juga menjadi faktor yang memperbesar risiko pernikahan dini. BP4 tidak hanya fokus pada edukasi bagi calon pengantin, tetapi juga memberikan perhatian pada remaja yang berada di lingkungan rentan tersebut melalui BRUS. Edukasi kesehatan reproduksi, simulasi penyelesaian konflik, serta penguatan nilai-nilai agama menjadi pendekatan utama dalam kegiatan ini. Hingga pertengahan 2025, angka pernikahan dini di Kecamatan Singosari mengalami tren penurunan, yakni dari 47 kasus di tahun 2023, menjadi 38 kasus pada tahun 2024, dan tersisa 17 kasus pada pertengahan 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang dilakukan BP4 mulai menunjukkan hasil yang signifikan, meski masih perlu diperkuat dengan sosialisasi yang lebih masif dan kolaborasi dengan pemerintah desa serta lembaga pendidikan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor penyebab pernikahan dini, pendekatan yang dilakukan BP4 dapat menjadi model intervensi berbasis edukasi dan nilai keagamaan yang efektif. Apalagi, jika didukung oleh kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan anak dan penguatan institusi keluarga. Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara khusus mengangkat peran BP4 di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah seperti Singosari yang memiliki tantangan sosial budaya cukup tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi efektivitas peran BP4 dalam membangun ketahanan keluarga serta menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Singosari. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis, baik bagi lembaga keagamaan, masyarakat, maupun pemerintah daerah dalam membangun strategi pencegahan pernikahan usia dini yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Metode

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk menggali, memahami, dan menjelaskan suatu fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran BP4 dalam membangun ketahanan keluarga dan menanggulangi pernikahan usia dini di Kecamatan Singosari. Proses ini diawali dengan perumusan masalah yang timbul dari pengamatan awal di lapangan serta tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan masih tingginya angka pernikahan usia dini di wilayah tersebut (Syafrida, 2022). Pada penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan hukum empiris, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data dan informasi faktual yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini dianggap tepat apabila peneliti ingin memahami secara langsung fenomena sosial yang sedang berkembang di tengah masyarakat, karena memungkinkan pengamatan terhadap realitas hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena fokus penelitian ini terletak pada satu lokasi spesifik dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dan sesuai konteks, tidak hanya mengenai aktivitas yang dijalankan oleh BP4, tetapi juga mencakup tanggapan masyarakat terhadap program tersebut, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam upaya menjawab berbagai isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dibutuhkan data yang dapat memberikan dasar informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka penelitian hukum, data umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi strategi BP4 secara lebih komprehensif dalam menangani permasalahan kompleks seperti pernikahan usia dini. Dengan mengintegrasikan hasil wawancara, temuan observasi di lapangan, serta dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA), peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan mengidentifikasi pola-pola sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menyajikan gambaran tentang situasi yang terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai bagaimana langkah-langkah pencegahan pernikahan dini serta penguatan ketahanan keluarga dijalankan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat (Faizin, 2022). Data yang digunakan meliputi berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan dari lembaga terkait, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Salah satu acuan utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap praktik pernikahan usia dini. Selain itu, dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) 2020–2030 juga dijadikan sebagai kerangka kebijakan nasional yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga, termasuk BP4, dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan anak secara terstruktur dan terpadu (KemenPPPA RI, 2020). Dalam penelitian ini, data tersier dimanfaatkan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah seperti "pernikahan dini" dan "ketahanan keluarga" dengan merujuk pada sumber-sumber seperti Ensiklopedia Hukum Islam dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu, data tersier juga digunakan untuk menyajikan gambaran umum melalui data statistik yang relevan guna mendukung analisis penelitian (Winarno et al., 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara umumnya,dilakukan secara semi-terstruktur atau tidak terstruktur sehingga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan alur percakapan dan menggali lebih dalam isu-isu yang dianggap signifikan oleh informan. Selanjutnya Peneliti dapat memperkaya data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus memperkuat validitas hasil penelitian, dengan memanfaatkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan, notulen, regulasi, foto, maupun arsip internal lembaga. Sebelum itu, peneliti perlu mengidentifikasi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Dalam analisis data peneliti mengambil referensi utama dalam menerapkan teknik triangulasi sebagai metode untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dalam studi lapangan (Khumairoh et al., 2023).

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi sosial yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai pendekatan untuk menjamin keabsahan data. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengonfirmasi,

memperkuat, serta memperkaya informasi dengan cara membandingkan berbagai perspektif, sumber data, dan metode pengumpulan data yang digunakan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Dini Di Kua Kecamatan Singosari

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh individu yang usianya belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara hukum, praktik ini dinilai melanggar ketentuan usia ideal pernikahan yang ditetapkan demi menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan yang akan menikah. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana batas usia minimal bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan laki-laki. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak, khususnya anak perempuan, dari praktik pernikahan yang terlalu dini.

Pernikahan sebelum usia matang dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan yang terputus, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, hingga risiko tinggi terhadap perceraian. Oleh karena itu, penetapan usia minimal pernikahan bertujuan untuk memberikan ruang bagi remaja agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam konteks sosial, pemahaman yang keliru di tengah masyarakat mengenai batas usia sah untuk menikah sering kali menjadi penyebab praktik pernikahan dini terus berlangsung. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan sosial secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dalam bidang Ilmu Psikologi dan Hukum Islam, usia ideal untuk memasuki jenjang pernikahan secara psikologis berada pada rentang 21 hingga 25 tahun bagi perempuan, dan 25 hingga 30 tahun bagi laki-laki. Rentang usia ini dianggap sebagai fase di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan yang cukup, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, pada usia tersebut individu telah

mampu berpikir lebih rasional, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan, serta memiliki kontrol emosi yang lebih stabil, yang sangat penting dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

Selain itu, secara sosial, mereka umumnya telah memiliki pengalaman hidup yang lebih luas dan keterampilan interpersonal yang lebih baik, yang mendukung terciptanya komunikasi yang sehat dalam relasi suami istri. Dalam konteks Hukum Islam, kematangan tidak hanya diukur dari kesiapan biologis, tetapi juga dari kematangan akal dan kemampuan untuk bertanggung jawab secara moral serta sosial. Oleh karena itu, menikah di usia yang terlalu muda, meskipun secara hukum mungkin diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sering kali belum disertai dengan kesiapan psikologis yang memadai. Menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang dapat menjadi salah satu cara untuk membangun keluarga yang lebih kokoh, harmonis, dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga (Indra, G. L., Al Arif, M. Y., & Zaelani, 2021).

Hasil wawancara mendalam dengan beberapa staf Kantor Urusan Agama (KUA) yang tergabung dalam Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Singosari mengungkapkan adanya tiga faktor utama yang secara konsisten menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Pertama, adalah faktor sosial budaya yang masih kuat mengakar di tengah masyarakat. Dalam beberapa komunitas, menikah di usia muda dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi solusi atas persoalan sosial tertentu seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari hubungan di luar nikah. Nilai-nilai budaya ini kerap mengabaikan aspek kesiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi dari pasangan muda.

Pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah, nilai-nilai sosial dan budaya sangat memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan usia muda. Menikahkan anak, khususnya perempuan, di usia dini sering dianggap sebagai pilihan paling masuk akal untuk menjamin masa depan mereka, terutama dalam situasi keterbatasan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh penuturan Ibu Anifatul, staf BP4 lainnya, yang mengatakan bahwa:

"*anak-anak perempuan lebih mudah manut menikah karena merasa tidak punya arah dan ingin segera keluar dari rumah*" (Wawancara, 17 Juni 2025).

Dalam konteks ini, pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis atas tekanan finansial yang dihadapi keluarga. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh struktur sosial yang bersifat patriarkal, di mana anak perempuan lebih dihargai ketika menikah ketimbang melanjutkan pendidikan, yang dinilai

membutuhkan biaya besar dan dianggap kurang memberikan manfaat langsung (Wulandari, D., & Arifin, 2022).

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusia. Banyak remaja, terutama yang putus sekolah, memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang benar terkait dampak negatif dari pernikahan usia dini. Kurangnya edukasi juga menyebabkan mereka tidak memiliki perencanaan hidup yang matang, sehingga pernikahan sering dijadikan jalan pintas untuk memperoleh status sosial atau keluar dari tekanan ekonomi. Keadaan ini mencerminkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk menikah di usia dini. Pendidikan memiliki peran penting, bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ketahanan remaja terhadap tekanan sosial serta membentuk pandangan hidup dan perencanaan masa depan yang lebih jelas dan terarah (Azhari, M., & Setiawan, 2022).

Ketiga, adalah minimnya kontribusi keluarga dalam memberikan pengawasan dan pembinaan. Kondisi seperti perceraian orang tua, hubungan jarak jauh (LDR), hingga ketidakhadiran figur ayah (fatherless), menjadikan anak-anak kehilangan figur pengasuh dan teladan. Akibatnya, banyak remaja tumbuh tanpa pendampingan emosional yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap keputusan-keputusan impulsif, termasuk dalam hal menikah muda. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Ibu Amilah, staf BP4 KUA Singosari, pada 17 Juni 2025. Ia menyatakan bahwa:

"*Anak-anak yang ditinggal orang tuanya kerja di luar kota atau menjadi TKI itu biasanya tinggal sama nenek atau buliknya. Tapi karena yang mengasuh sudah tua atau sibuk, anak jadi kurang perhatian dan sering ikut-ikutan teman. Kami pernah menemui kasus, anak perempuan usia 16 tahun yang ingin menikah karena katanya sudah 'terlanjur dekat' dengan pacarnya. Padahal kalau orang tuanya di rumah dan aktif membimbing, kemungkinan besar tidak seperti itu*."

Banyak anak di Kecamatan Singosari yang diasuh oleh nenek atau kerabat karena orang tuanya bekerja di luar kota atau luar negeri. Akibatnya, pengawasan terhadap anak menjadi minim, sementara kebutuhan emosional dan perhatian anak tidak terpenuhi. Hal ini mendorong anak mencari pengakuan dan kenyamanan dari hubungan romantis yang kemudian berujung pada keinginan menikah di usia dini. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi pengasuhan tidak utuh memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi

terhadap pengambilan keputusan yang impulsif, termasuk pernikahan (Khumairoh et al., 2023)

Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Singosari tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kultural setempat. Oleh karena itu, strategi penanggulangan yang dilakukan oleh BP4 harus mempertimbangkan pendekatan yang menyentuh akar permasalahan, seperti edukasi keluarga, perubahan nilai kolektif, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan secara merata. Upaya preventif melalui program seperti BRUS dan Bimbingan Pranikah hanya akan efektif jika dibarengi dengan transformasi nilai sosial yang mendasari praktik pernikahan dini tersebut.

2. Efektivitas BP4 Dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Dan Menanggulangi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Dini

Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Singosari memegang peran yang sangat strategis dalam upaya membangun ketahanan keluarga serta menanggulangi pernikahan dini yang masih menjadi masalah sosial di wilayah tersebut. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, BP4 tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam proses pernikahan, tetapi juga berperan aktif sebagai agen transformasi sosial yang memberikan bimbingan, edukasi, dan layanan mediasi kepada masyarakat. Melalui berbagai program seperti bimbingan pranikah, BP4 membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, hingga manajemen ekonomi rumah tangga.

Selain itu, BP4 juga menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan usia dini. Dengan melibatkan tokoh agama, penyuluh, dan institusi terkait lainnya, lembaga ini aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari menikah terlalu muda, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Dalam praktiknya, BP4 juga menyediakan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan atau keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga, guna mencegah terjadinya perceraian yang tidak perlu. Melalui pendekatan yang persuasif dan berbasis nilai keagamaan, BP4 berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, kuat secara emosional dan spiritual, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, BP4 KUA Kecamatan Singosari memainkan peran penting dalam memperkuat institusi keluarga dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Untuk mengatasi pernikahan usia dini dan memperkuat ketahanan keluarga, BP4 KUA Kecamatan Singosari telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang bersifat edukatif, preventif, dan persuasif. Salah satu program utama yang menjadi fokus adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin), yang ditujukan kepada pasangan calon pengantin. Melalui program ini, peserta diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental dan emosional dalam membina rumah tangga, serta cara mengelola konflik secara konstruktif. Tujuan dari program ini bukan hanya agar calon pengantin memenuhi persyaratan administratif pernikahan, melainkan juga agar mereka benar-benar siap secara psikologis dan sosial untuk menjalani kehidupan pernikahan secara matang dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Bimwin dilakukan secara sistematis dan dengan pendekatan yang terukur, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah. Program ini juga terbukti efektif dalam mengurangi angka perceraian serta menekan kasus pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa, termasuk pernikahan pada usia yang masih terlalu muda. Dengan pendekatan ini, BP4 tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga berperan sebagai agen pembinaan keluarga yang aktif dan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan rumah tangga di masa depan (Prayogi & Jauhari, 2021).

Selain fokus pada calon pengantin, BP4 juga menjalankan program Pusaka Sakinah yang ditujukan bagi pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan antara dua hingga lima tahun. Program ini bertujuan untuk memperkuat fondasi rumah tangga pada fase awal pernikahan yang rentan terhadap konflik. Materi dalam program ini menitikberatkan pada pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga, pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, pendidikan anak yang berbasis nilai, serta penguatan aspek spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Pusaka Sakinah berfungsi sebagai sarana pendampingan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dinamika rumah tangga, guna mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Keunggulan program ini terletak pada pendekatannya yang menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Pelaksanaannya melibatkan penyuluh agama, konselor keluarga, serta menjalin kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Dinas Sosial dan Puskesmas. Kolaborasi ini memungkinkan penanganan permasalahan rumah tangga secara lebih komprehensif, mencakup aspek psikologis, sosial, dan

kesehatan. Dengan metode yang bersifat partisipatif dan integratif, Pusaka Sakinah menjadi salah satu inisiatif penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, tangguh, dan mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan pernikahan di masa-masa awal (Sakinah, M., Latifah, S., & Rofiq, 2021)

Dalam rangka mencegah pernikahan usia dini, BP4 KUA Kecamatan Singosari mengimplementasikan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang ditujukan bagi siswa tingkat SMP dan SMA. Program ini berfokus pada edukasi mengenai kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, serta pengembangan keterampilan hidup (*life skills*). Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan pihak sekolah dan Puskesmas, dalam bentuk seminar, diskusi kelompok, dan penyuluhan interaktif. Berdasarkan keterangan staf BP4, Ibu Anifatul, program ini dirancang untuk membangun kesadaran remaja bahwa pernikahan menuntut kesiapan fisik dan psikis, bukan sekadar status sosial. Integrasi nilai keagamaan memperkuat efektivitas pendekatan ini (Safitri, M., & Syukriati, 2024). Pada Wawancara, 17 Juni 2025 dengan Ibu Anifatul, staf BP4, menyampaikan bahwa:

"*Kami mengajak remaja untuk memahami bahwa pernikahan itu bukan sekadar status sosial. Kami libatkan Puskesmas agar mereka tahu konsekuensi biologis dan psikologis dari menikah muda. Dengan BRUS, kami ingin remaja punya bekal berpikir kritis sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah*."

Selain menjalankan program edukatif bagi remaja, BP4 KUA Kecamatan Singosari juga secara aktif mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat umum, khususnya di wilayah pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional terkait pernikahan usia muda. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi masyarakat seperti forum warga, pengajian, dan dialog langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa. Pendekatan ini dipilih agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menyentuh aspek budaya serta kepercayaan lokal yang masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga. Fokus utama dari penyuluhan ini adalah membangun kesadaran kolektif bahwa pernikahan dini bukanlah solusi terhadap masalah kemiskinan, ketidakstabilan sosial, atau cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Sebaliknya, BP4 berupaya menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi justru dapat menimbulkan berbagai persoalan baru seperti putus sekolah,

kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, serta tingginya angka perceraian.

Melalui komunikasi yang intensif dan pendekatan kultural, BP4 mencoba menggeser paradigma lama menuju cara pandang baru yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan penyuluh agama dan kader masyarakat, agar pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun komitmen bersama dalam pencegahan pernikahan dini.

Dengan demikian, upaya Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi pernikahan usia dini sekaligus membangun ketahanan keluarga dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Strategi yang dijalankan mencakup berbagai tahap penting, dimulai dari pencegahan di kalangan remaja melalui edukasi dan penyuluhan, pembekalan pengetahuan dan kesiapan bagi calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), hingga pendampingan bagi pasangan suami istri melalui program seperti Pusaka Sakinah. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan faktor usia, kesiapan mental, kondisi sosial, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan BP4 dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, puskesmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga instansi pemerintah daerah terkait. Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan pelaksanaan program yang lebih komprehensif dan berdaya jangkau luas. Selain itu, pendekatan yang digunakan BP4 juga bersifat kontekstual, yakni disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya lokal agar lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat.Temuan ini menegaskan bahwa penanganan pernikahan dini tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan strategi intervensi yang integratif, partisipatif, dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar efektif dan berkelanjutan dalam membangun keluarga yang tangguh.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Singosari telah berperan secara efektif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini dan penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif yang dijalankan secara terstruktur. Program Bimbingan Perkawinan

(Bimwin) memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin tentang kesiapan menikah secara fisik, mental, dan sosial. Program Pusaka Sakinah terbukti mendukung keberlangsungan rumah tangga dengan memperkuat komunikasi dan nilai spiritual dalam keluarga. Sementara itu, program BRUS berhasil menyasar kelompok remaja usia sekolah dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini.

Efektivitas program-program tersebut tercermin dari tren penurunan jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Singosari, yakni dari 47 kasus pada tahun 2023 menjadi 38 kasus di tahun 2024, dan menurun lagi menjadi 17 kasus pada pertengahan tahun 2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya BP4 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial yang nyata dalam membentuk pola pikir dan kesiapan masyarakat menuju keluarga yang harmonis dan tahan terhadap tekanan sosial budaya. Oleh karena itu, strategi intervensi BP4 dapat dijadikan model dalam penguatan keluarga dan pencegahan pernikahan usia dini berbasis komunitas keagamaan dan nilai lokal yang kontekstual.

E. Daftar Rujukan

Azhari, M., & Setiawan, A. (2022). *Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Keputusan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. Jurnal Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga,*. 134–147.

Faizin, M. (2022). Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan dibawah Umur. *Jurnal Maqosid*, *10*(02), 51.

Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, *24*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4

Imran, A., & Salim, A. (2022). Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Damhil Education Journal*, *2*(2), 87. https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1408

KemenPPPA RI. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)*. 2020.

Khumairoh, A., Jannah, S., & Muslim, M. (2023). Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Di Usia Dini (Studi Kasus Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, *5*(3), 15–30.

Prayitno, I. H., Sofwan, E., & Ibrohim, I. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan. *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 70–85. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/grd/article/view/12828

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *5*(2), 223. https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267

Safitri, M., & Syukriati, S. (2024). *Integrasi Edukasi Keagamaan dan Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Jurnal Pendidikan Sosial Islam*. 77–79.

Sakinah, M., Latifah, S., & Rofiq, A. (2021). *Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menanggulangi Perceraian Dini. Jurnal Studi Keluarga,*. 44–59.

Syafrida, & H. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta*.

Winarno, S. S., Anggriani, Y., Sulistiawati, Y., & Utami, I. T. (2024). *Reproduksi Dengan Sikap Pernikahan Usia Dini Di Sma Negeri 1 Kalirejo Tahun 2024 (the Correlation Between Adolescents ' Knowledge of Reproductive Health and Attitudes Towards Early Marriage in Senior High School 1 Kalirejo in 2024)*. *Bps 2023*.

Wulandari, D., & Arifin, M. Z. (2022). *Analisis Sosial Ekonomi terhadap Praktik Pernikahan Dini di Wilayah Marginal. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,*.